

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
KOLEKSI BIDANG ILMU
TIDAK DIPINJAMKAN
KHUSUS DIPAKAI DALAM PERPUSTAKAAN

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

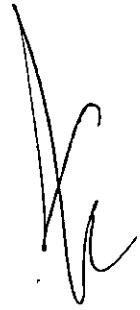
PERUBAHAN SOSIO - KULTURAL :

Proses, Efek, Disorganisasi, Penyesuaian Sosial & Integrasi Kebudayaan

Oleh

Emizal Amri

| | |
|--------------------------|------------------|
| PERPUSTAKAAN IKIP PADANG | |
| DI TERIMA TGL | maret 1989 |
| SUMBER/HARGA | Hadiah |
| KOLEKSI | U1 |
| NO. INVENTARIS | 6052/H2/SJ-P (1) |
| KLASIFIKASI | 3.06 Amr P |



FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
P A D A N G

1989

KATA PENGANTAR

Tulisan ini dimaksudkan sebagai tambahan bacaan dalam mata kuliah Antropologi Kebudayaan Indonesia dan mata kuliah Sosiologi. Disebabkan oleh berbagai keterbatasan, ternyata sebagian besar mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut tidak dapat memiliki maupun membaca secara intensif beberapa literatur yang telah ditentukan. Dihadapkan kepada kenyataan ini, maka dalam rangka pembinaan dan pengembangan kedua mata kuliah, penulis mencoba meramu bahan-bahan tentang perubahan sosio-kultural yang merupakan tema penting dalam kedua mata kuliah tersebut.

Setelah membaca uraian dan penjelasan ini, diharapkan mahasiswa mampu melihat dan memahami berbagai kasus, sehubungan dengan konsep/teori 'perubahan sosio-kultural' yang dipelajarinya dalam kedua mata kuliah. Agar uraian ini dapat ditangkap dengan mudah, maka penjelasannya dilengkapi dengan contoh-contoh, baik berupa kasus yang terjadi dalam masyarakat pada skala kecil maupun dalam skala luas. Semoga dengan bekal pemahaman tersebut, mahasiswa mampu mengungkapkan perubahan sosio-kultural dalam scope; spatial dan temporal yang lebih khusus. Artinya, perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung pada suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu.

Dalam usaha menyusun tulisan ini, penulis telah memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setesan-besarnya kepada: bapak Drs Amir B yang telah banyak memberikan bantuan, terutama memberikan

beberapa literatur penting, yang amat berharga guna penyelesaian tulisan ini. Kemudian kepada bapak Drs Nur Anas Zaidan yang telah banyak memberikan dorongan dalam rangka penulisan ini. Akhirnya, atas bantuan yang disumbangkan oleh berbagai pihak, penulis juga mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Terakhir, dengan segala kerendahan hati penulis mohon keritikan dan saran yang bersifat membangun dari siapa saja yang sempat membaca tulisan ini. Hal ini adalah sangat berharga, terutama untuk penyempurnaan tulisan ini pada masa berikutnya.

Padang, Akhir Pebruari '89

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| BAB II PERUBAHAN SOSIO-KULTURAL | 4 |
| A. Proses Perubahan Sosio-kultural | 4 |
| B. Efek Perubahan Sosio-kultural | 14 |
| C. Disorganisasi Sosial | 22 |
| D. Penyesuaian Sosial & Integrasi Kebudayaan | 30 |
| BAB III KESIMPULAN | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA | 51 |

I. PENDAHULUAN

Setiap masyarakat di mana pun mereka hidup dan bertempat tinggal di muka bumi ini, pasti mengalami proses perubahan-perubahan, baik dalam lapangan sosial maupun kebudayaan. Sering juga kita mendengar berbagai pernyataan (statement) dari orang-orang yang hidup di zaman modern ini, bahwa masyarakat tradisional yang hidup di masa lampau adalah bersifat statis. Anggapan seperti itu sesungguhnya sangat keliru, sebab masyarakat yang hidup bersahaja pun tetap mengalami perubahan dalam proses historisnya. Perubahan itu tidak hanya terbatas pada bidang sosial (kemasyarakatan) saja, melainkan juga aspek-aspek kebudayaan yang didukung dan dikembangkannya.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat tradisional umumnya memang berlangsung lambat atau lamban. Manusia pra sejarah misalnya; membutuhkan waktu ratusan ribu, bahkan jutaan tahun untuk merubah tingkat penghidupannya dari foodgathering menjadi pola kehidupan foodproducing. Meskipun lambat, tetapi mereka jelas mengalami perubahan, baik di bidang sosial maupun di bidang kebudayaan. Berbeda halnya dengan proses perubahan yang terjadi pada manusia pra sejarah dan masyarakat tradisional, maka perubahan-perubahan dalam masyarakat modern dewasa ini berlangsung dengan cepat. Walaupun setiap masyarakat tidak akan luput dari segala bentuk perubahan; akan tetapi ada perubahan tersebut yang disadari dan menjadi pusat perhatian bagi banyak orang, sementara itu ada juga yang luput dari perhatian dan pengamatan manusia yang sedang mengalami proses perubahan itu sendiri.

Perubahan sosio-kultural merupakan konsep penting yang banyak menarik perhatian ahli-ahli ilmu sosial, terutama ahli sosiologi dan antropologi budaya. Dengan menerapkan konsep tersebut terhadap suatu masyarakat di lokasi tertentu, kita akan dapat memahami perkembangan masyarakat tersebut dari priode ke priode lainnya. Dengan bekal itu, lebih lanjut akan dapat diketahui proses perubahan sosial dan kebudayaan pada masyarakat bersangkutan.

Supaya tidak terjadi kekeliruan dalam mengikuti uraian berikut, kiranya berguna juga penjelasan mengenai pengertian dari topik tulisan ini. Judul tulisan ini terdiri dari dua bagian yaitu judul induk dan judul imbuhan. Secara lengkap judul tersebut adalah sebagai berikut: Perubahan Sosio-Kultural: Proses, Efek, Disorganisasi, dan Penyesuaian Sosial. Di dalam judul induk terkandung pengertian, bahwa yang akan dibahas di sini adalah mencakup; perubahan sosial, dan perubahan kebudayaan. Secara teoritis kedua masalah ini dapat dibedakan dengan tajam, yaitu dengan mengembalikan keduanya kepada konsep dasarnya masing-masing. Namun demikian, dalam kenyataannya (praktis) perubahan sosial dan perubahan kebudayaan sangat erat kaitannya. Bahkan dalam beberapa kasus kedua persoalan itu tidak mungkin untuk dipisahkan satu sama lain. Ringkasnya, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, sebaliknya tidak ada kebudayaan yang tidak terjelma dari individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam tulisan ini kedua konsep itu tidak akan dipisahkan secara tegas, sebab dalam kenyataannya batas di antara keduanya sangat relatif dan kabur sekali sifatnya.

Perubahan sosio-kultural yang termaktub di dalam judul induk tersebut masih mencakup permasalahan yang cukup luas dan kompleks. Oleh sebab itu, perlu diberikan batasan terhadap aspek-aspek yang akan dibahas lebih lanjut. Pembatasan tersebut dituangkan di dalam judul imbuhan, di mana uraian berikut hanya akan berkisar pada: proses perubahan sosio-kultural; efek (pengaruhnya) secara umum; disorganisasi yang terjadi akibat perubahan sosio-kultural, serta; penyesuaian sosial (termasuk ke dalamnya integrasi kebudayaan) dalam rangka menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Segala sesuatu yang berada di luar atau tidak ada kaitannya dengan keempat aspek di atas, tidak akan dibahas dalam tulisan ini.

Tulisan ini bukanlah bertujuan untuk mengupas perubahan sosio-kultural yang terjadi (berlangsung) dalam masyarakat tertentu. Akan tetapi hanyalah untuk memaparkan beberapa persoalan di sekitar perubahan sosio-kultural, serta meninjau berapa kemungkinan pemecahannya secara umum. Penjelasan itu juga dilengkapi dengan beberapa contoh, sehingga proses perubahan sosio-kultural yang berlangsung akan dapat dipahami dengan mudah. Walaupun tulisan ini bersifat umum, namun beberapa konsep penting dan penjelasan-penjelasan berikut diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti, khususnya bagi yang berminat menelaah perubahan sosio-kultural dalam masyarakat tertentu pada periode yang ditentukannya. Uraian yang lebih lengkap tentang pokok persoalan di atas, dapat dikuti dalam bab berikut ini.

II. PERUBAHAN SOSIO-KULTURAL

A. Proses Perubahan Sosio-kultural

Kapankah suatu perubahan sosio-kultural terjadi dan bagaimana cara memahaminya? Perubahan sosio-kultural hanya akan dapat diungkap (dipahami) dengan memperbandingkan susunan dan kehidupan, serta kebudayaan yang didukung (dipelihara) oleh suatu masyarakat dalam dua kurun waktu yang berbeda. Dengan demikian penentuan dimensi atau ukuran waktu merupakan faktor yang paling penting untuk memahami perubahan sosial dan budaya dalam suatu masyarakat tertentu. Tanpa membuat perbandingan yang cermat tentang situasi dan kondisi masyarakat yang sama dalam periode waktu berbeda, kita tidak akan dapat memahami perubahan-perubahan apa yang telah dan sedang berlangsung.

Dalam bab terdahulu telah dikemukakan, bahwa setiap masyarakat di mana pun mereka bertempat tinggal pasti mengalami perubahan-perubahan. Proses perubahan itu sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain; keadaan, waktu, dan tempat. Di lihat dari segi sumbernya, secara umum dapat dikategorikan bahwa perubahan sosial dan kebudayaan tersebut berasal dari dua faktor. Pertama, faktor eksternal yaitu perubahan-perubahan yang disebabkan oleh segala sesuatu yang berasal dari luar masyarakat bersangkutan. Kedua, faktor internal yaitu faktor yang berasal dan tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam beberapa kasus faktor eksternal dan internal tersebut saling menopang perubahan di bidang tertentu dengan dampak yang demikian luas. Sebagai contoh, masuknya pengaruh Barat ke Indonesia telah menimbulkan

dampak di berbagai segi kehidupan. Akibatnya unsur-unsur dan nilai-nilai lama yang sudah tidak relevan, mulai ditinggalkan dan diganti dengan hal-hal yang baru. Dengan demikian terjadilah perubahan yang disebabkan oleh faktor yang bersumber dari luar masyarakat itu sendiri. Kemudian dalam rangka merealisasikan unsur-unsur dan nilai-nilai yang baru tersebut, maka dalam aspek-aspek tertentu masyarakat bersangkutan juga memandang perlu untuk melakukan perubahan-perubahan. Hal terakhir ini memberi petunjuk bahwa, telah terjadi perubahan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri.

Ogburn dan Nimkoff mengemukakan bahwa, timbulnya perubahan socio-kultural antara lain disebabkan oleh; perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, perkembangan transportasi, harapan dan tuntutan manusia yang bersangkutan.¹ Perkembangan ilmu pengetahuan merupakan faktor terpenting yang mendorong perubahan socio-kultural dalam masyarakat modern. Melalui perkembangan ilmu pengetahuan setiap individu atau masyarakat di tempat tertentu dapat menyerap pola-pola sosial dan kebudayaan di tempat lain yang begitu jauh sekali pun. Informasi, pengetahuan, dan nilai-nilai baru yang diserap oleh individu-individu itu pada gilirannya dapat mendorong ke arah terjadinya perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat tersebut.

Sejak beberapa abad belakangan ini, perkembangan ilmu pengetahuan tidak hanya terbatas pada masalah teoritis belaka, melainkan juga diikuti oleh perkembangan ilmu pengetahuan praktis (terapan). Faktor ini berpe-

¹W.F. Ogburn and Mayer K. Nimkoff, Sociology (Boston, New York: Houghton Mifflin Company, 1964), p. 676.

ngaruh langsung terhadap perkembangan teknologi dan transportasi. Pemanfaatan teknologi dan transportasi, membuat jarak antara berbagai tempat di dunia ini semakin dekat. Dengan demikian proses transformasi sosial dan budaya dapat berlangsung dengan cepat. Kemajuan dan perkembangan yang diraih oleh suatu masyarakat dapat ditiru dan diambil oleh masyarakat lain untuk dikembangkan menjadi miliknya. Melalui langkah tersebut berkembanglah pola-pola sosial dan budaya baru dalam masyarakat bersangkutan, serta menggeser pola-pola sosial dan budaya yang sudah tidak relevan lagi. Unsur-unsur baru itu sudah pasti dikembangkan sesuai dengan tuntutan, harapan, dan kebutuhan masyarakat setempat.

Kalau ditelusuri secara lebih cermat, maka proses perubahan sosial itu berlangsung melalui tiga tahap: Pertama, Invensi yaitu proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan; Kedua, difusi yang mana merupakan proses di mana ide-ide baru tersebut dikomunikasikan; Ketiga, konskwensi yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial, diterima atau ditolak.² Ketiga tahap di atas biasanya akan berjalan seiring dalam suatu proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut akan dapat dipahami dengan jelas setelah mengikuti penjelasan berikut.

Akhir-akhir ini Indonesia misalnya, dihadapkan pada masalah kependudukan. Di satu pihak pertambahan penduduk laju dengan cepat, sementara di pihak lain harapan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial semakin mendesak. Para ahli kependudukan berkoyakinan bahwa, ledakan penduduk merupakan faktor penghalang utama bagi perwujudan

²Abdillah Hanafi, Memasyarakatkan Ide-ide Baru (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), p. 16.

7

kesejahteraan sosial. Sehubungan dengan itu dikembangkan gagasan untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk yang demikian pesat. Dalam kaitan ini dikembangkan program keluarga berencana oleh BKKBN dengan berbagai instansi yang terkait. Guna merealisasikan maksud tersebut maka diciptakanlah berbagai alat untuk mengatasi kelahiran, terutama berupa alat kontrasepsi. Alat-alat itu selanjutnya diperkenalkan kepada masyarakat, khususnya kepada pasangan usia subur. Lebih jauh hal ini menimbulkan perubahan-perubahan dalam pola hubungan keluarga di tengah-tengah masyarakat. Dalam menghadapi ide-ide baru sehubungan dengan Keluarga Berencana itu, maka timbul berbagai tanggapan dalam masyarakat. Pada awal perkembangannya, ternyata gagasan dan peralatan untuk mengatasi kelahiran tersebut sulit diterima oleh anggota masyarakat, karena hal itu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kebiasaan yang berlaku sebelumnya. Kemudian setelah berbagai instansi dan kelompok masyarakat aktif menyebarkan gagasan keluarga berencana itu, maka dewasa ini sebagian besar dari gagasan tersebut telah diterima dan diakui keberadaannya di tengah-tengah keluarga dalam masyarakat. Dengan demikian terjadilah berbagai perubahan di bidang sosial sebagai akibat pengembangan program keluarga berencana. Sebagai contoh, perinsip 'banyak anak, banyak rejeki' dalam masyarakat tradisional, berubah menjadi norma 'keluarga kecil dan bahagia' dalam masyarakat Indonesia dewasa ini. Di samping itu juga terjadi perubahan pada tata pergaulan dalam keluarga, dan perubahan-perubahan lainnya.

Lebih jauh William F. Ogburn dan Mayer F. Nimkoff berpendapat bahwa, perubahan sosio-kultural sesungguhnya mencakup unsur-unsur kebudayaan material, dan unsur-

unsur kebudayaan imaterial.³ Kebudayaan material merupakan hasil karya dan cipta manusia berupa benda-benda dan sifatnya kongkrit. Kebudayaan material itu tidak lain adalah suatu manifestasi dari kebudayaan yang sifatnya abstrak, yang memberi pengertian dan nilai pada benda-benda sebagai hasil usaha dan karya manusia yang dilakukan dengan sadar untuk tujuan-tujuan tertentu, dan sistem sosial masyarakatnya. Sebaliknya kebudayaan material berwujud sebagai sistem budaya yang mencakup kebudayaan rohani. Ada pun yang termasuk kedalam kelompok kebudayaan imaterial itu misalnya, sistem religi, ideologi, kebatinan, kesenian, organisasi sosial, dan semua unsur lainnya yang merupakan hasil ekspresi dari jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat.

Jika Ogburn dan Ninkoff membedakan kebudayaan menjadi dua unsur yaitu material dan imaterial, maka Koentjaraningrat membagi kebudayaan kepada tiga wujud; "1) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan sebagainya; 2) wujud kebudayaan sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat; 3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda sebagai hasil karya manusia."⁴

Wujud pertama yang dikemukakan Koentjaraningrat ini merupakan salah satu aspek dari kebudayaan imaterial, khususnya yang menyangkut wujud ideal dari suatu kebudayaan. Oleh karenanya kebudayaan dalam wujud ini bersifat abstrak dan tidak dapat diraba, difoto, maupun

³William F. Ogburn and Meyer F. Ninkoff, A Hand Book of Sociology (London: Margan Paul Ltd., 1953), pp. 191-197.

⁴Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan

dilihat. Wujud ideel dari suatu kebudayaan tersebut sering juga disebut sebagai adat tata kelakuan. Selanjutnya yang dikategorikan Koentjaraningrat kepada wujud yg kedua di atas, juga merupakan aspek lain dari kebudayaan material, khususnya yang menyangkut sistem sosial. Bila hal itu menyangkut sistem sosial, tentu saja masalah itu menyangkut kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Terakhir yaitu wujud ketiga dari kebudayaan adalah berupa kebudayaan fisik, atau sama dengan apa yang diistilahkan Ogburn dan Nimkoff dengan kebudayaan material. Kebudayaan dalam bentuk ini merupakan total hasil fisik dari aktifitas, perbuatan, dan karya manusia. Dengan demikian sifatnya kongkrit, dapat diraba, dilihat, dan difoto.

Pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan (baik kebudayaan material maupun imaterial) tidaklah sama cepatnya. Ada bagian-bagian tertentu dari unsur kebudayaan cepat (pesat) perkembangannya. Sementara ada unsur-unsur tertentu dari kebudayaan tumbuh dengan lambat (lambat) dalam suatu masyarakat. Perbedaan taraf kemajuan atau perkembangan dari berbagai unsur kebudayaan dalam masyarakat tertentu disebut juga cultural lag⁵.

Terdapat suatu kecenderungan umum bahwa, kebudayaan material berkembang lebih cepat. Sebaliknya kebudayaan imaterial cenderung mengalami perkembangan yang lebih lambat. Persoalan semacam ini sering membawa berbagai ekases di tengah-tengah masyarakat sebagai aki-

Pembangunan (Jakarta: Gramedia, 1984), p. 5.

⁵Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, Se-tangkai Bunga Sosiologi (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1964), p. 493. Soerjono Soekanto, Sosiologi

bat dari ketimpangan perkembangan kedua unsur kebudayaan tersebut. Di tengah-tengah masyarakat Indonesia modern dewasa ini tidak jarang kasus seperti itu kita temui, di mana sikap mental individu dalam masyarakat tidak mampu mengimbangi perkembangan teknologi modern. Berikut diambil sebuah contoh yang sederhana, di mana pada beberapa perguruan tinggi, kantor, maupun di terminal, kita banyak menjumpai closet (W.C.) yang dilengkapi dengan kaca dan sisir, serta tisu. Oleh karena sikap mental individu/masyarakat pemakainya belum siap untuk menerima hasil teknologi ini, Akibatnya beberapa waktu setelah W.C. tersebut dipakai akan terjadi bermacam-macam masalah misalnya; sisir yang disediakan hilang, kacanya pecah, dan W.C. tersebut kotor dan tidak terawat sama sekali. Akhirnya dalam waktu yang pendek, segala perlengkapan yang telah disediakan tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana layaknya.

Kembali kepada pokok persoalan semula yaitu perubahan sosio-kultural, maka secara umum perubahan-perubahan itu dapat dikategorikan kepada 3 (tiga) bagian.⁶ Pengkategorian ini dibuat berdasarkan pertimbangan; waktu, cakupan, dan sumber dari perubahan-perubahan yang terjadi. Guna memberikan penjelasan yang agak luas, berikut akan dicoba menjelaskan satu per satu.

Dilihat dari segi waktunya, maka perubahan sosio-kultural dapat dibedakan kepada; perubahan-perubahan yang terjadi secara lambat (evolusi) di satu pihak, dan perubahan-perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat (revolusi) di pihak lain. Perubahan yang terjadi secara

Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali, 1982), p. 350.

⁶ Pembagian ini hanyalah berdasarkan pertimbangan praktis untuk membuat uraian lebih lanjut agar lebih mudah dipahami, bukan bertolak dari teori tertentu.

ra evolusi adalah serentetan perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti secara berlahan-lahan. Perubahan tipe ini biasanya terjadi sebagai akibat dari usaha manusia dalam rangka menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan, dan kondisi-kondisi yang baru. Dalam kaitan ini dapat diambil sebagai contoh tentang perubahan sistem pemerintahan nagari menjadi pemerintahan desa. Kebijakan ini secara bertahap telah menimbulkan perubahan-perubahan di bidang sosial dan kebudayaan dalam masyarakat desa di Sumatera Barat. Pemerintahan desa diatur menurut prinsip-prinsip administrasi modern, sebagai pengganti sistem pemerintahan tradisional. Seiring dengan itu peranan elite tradisional digeser oleh elite baru (pemegang pemerintahan desa) pada setiap desa. Untuk membantu pembangunan masing-masing desa, maka pemerintah pusat mengalokasikan bantuan dana bagi proyek pembangunan pedesaan. Namun hal itu dalam batas-batas tertentu telah mendorong ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah, sehingga partisipasi masyarakat (baik swadaya maupun gotongroyong) yang berkembang sebelumnya, dewasa ini cenderung menurun di setiap desa.

Perubahan secara cepat (revolusi) merupakan perubahan yang bersifat mendasar dan berkaitan dengan sendi-sendi pokok dari kehidupan masyarakat. Revolusi Industri di Inggris misalnya, telah berhasil merubah pola-pola kehidupan sosial dan kebudayaan bangsa itu dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Lebih jauh hal itu berpengaruh terhadap sikap mental, pola hubungan sosial, tata pergaulan, temuan-temuan baru di bidang ilmu dan teknologi bangsa Inggris. Dengan demikian terjadilah proses perubahan sosial dan budaya di tengah-tengah masyarakat Inggris dalam waktu yang relatif singkat, dan bersifat mendasar.

Dilihat dari segi jangkauan (cakupannya) perubahan sosio-kultural dapat dibedakan kepada; perubahan-perubahan yang berpengaruh kecil dan, perubahan-perubahan yang berpengaruh luas (besar). Perubahan yang berpengaruh kecil yaitu perubahan yang terjadi pada aspek-aspek sosial dan kebudayaan tertentu, sifatnya sangat terbatas dan tidak menyeluruh. Contoh perubahan tipe ini antara lain adalah; perubahan dalam tata cara berpakaian (mode) yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari masuknya pengaruh luar. Yang lain misalnya, kecenderungan segelintir ilmuwan dan pejabat pemerintah untuk menggunakan istilah-istilah asing dalam penyampaian informasi terhadap audience (hadirin/pendengar), tanpa memberikan penjelasan yang memadai.

Sebaliknya perubahan yang berpengaruh besar ialah perubahan yang sifatnya menyeluruh/mendasar dalam berbagai aspek kehidupan atau kebudayaan masyarakat. Sebagai contoh antara lain; masuknya sistem ekonomi uang ke Indonesia, telah membawa perubahan-perubahan yang mendasar pada pola perekonomian tradisional Indonesia. Lebih jauh hal ini berpengaruh pada pola produksi dan pemasaran hasil-hasil komoditi lokal di Indonesia, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap uang semakin meningkat. Demikian pula halnya dengan berlangsungnya proses industrialisasi dalam masyarakat agraris, di mana hasil-hasil teknologi modern dimanfaatkan untuk mengolah lahan dan produk pertanian. Meskipun perkembangan ini tidak terbebas dari berbagai eksek sosial dan kebudayaan, namun hal tersebut dapat meningkatkan produk pertanian, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kecenderungan terakhir ini sudah pasti menimbulkan berbagai perubahan dalam lapangan sosial dan kebudayaan masyarakat setempat.

Ditinjau dari perspektif sumbernya, maka perubahan sosio-kultural dapat dibedakan kepada; perubahan-perubahan yang dikehendaki (direncanakan) dan, perubahan-perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan maksudnya adalah suatu perubahan yang diprogramkan oleh pihak-pihak tertentu (agent of change) yang menghendaki terjadinya perubahan, misalnya pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya. Sebagai salah satu contoh diambil mengenai program pengembangan pendidikan di Indonesia. Sejak beberapa REPELITA terakhir ini pemerintah berupaya untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia, baik melalui peningkatan maupun pemerataan pendidikan bagi setiap warganegara. Setidak-tidaknya secara kuantitatif program ini dapat dinilai berhasil dengan baik. Di beberapa daerah di Indonesia, tingkat buta aksara yang dianggap sebagai momok modernisasi dan kemajuan dapat ditekan ke tingkat yang lebih kecil. Dengan demikian tingkat pendidikan masyarakat semakin meningkat, sehingga pada gilirannya dapat mendorong perubahan sosial dan kebudayaan ke arah kemajuan.

Di pihak lain terdapat perubahan yang tidak direncanakan dan tidak dikehendaki. Perubahan ini biasanya berlangsung di luar jangkauan individu atau kelompok sosial tertentu dalam masyarakat. Perubahan dalam bentuk ini umumnya membawa akibat atau ekseseks sosial yang tidak diharapkan. Sebagai contohnya dapat dikembalikan kepada program perkembangan pendidikan yang dilancarkan pemerintah seperti dikemukakan di atas. Di lihat dari satu sisi, pemerintah dapat dikatakan berhasil untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Namun di pihak lain terjadi ekseseks sosial, karena lembaga pendidikan tidak membekali peserta didik dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai. Keadaan se-

macam itu semakin terasa menyulitkan, sebab lapangan kerja tidak cukup tersedia. Semnetara lulusan lembaga pendidikan itu sendiri tidak mau bekerja seperti semula, sedangkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru mereka juga tidak mampu. Akibatnya, sekarang ini pemerintah dihadapkan kepada suatu persoalan, di mana membengkaknya angka pengangguran dari kalangan lulusan lembaga-lembaga pendidikan. Seiring dengan itu terjadilah perubahan sosial yang tidak diharapkan, yang melekat pada program pemerataan pendidikan yang dilancarkan pemerintah. Dengan demikian muncul kelompok sosial lepasan pendidikan yang tidak mempunyai pekerjaan yang layak, mereka ini umumnya tersebar dalam masyarakat perkotaan, terutama di kota-kota besar di Indonesia.

B. Efek Perubahan Sosio-kultural

Uraian di atas secara eksplisit telah menyinggung efek atau dampak dari perubahan sosio-kultural yang terjadi dalam masyarakat. Akan tetapi hal tersebut akan dicoba menelaahnya secara lebih terinci. Perubahan sosio-kultural tersebut sesungguhnya mengacu kepada dua kutup yang berbeda. Di satu pihak adalah perubahan yg mengarah kepada kemajuan (progress) dan, dilain pihak suatu perubahan juga dapat menyebabkan kemunduran (regress).

Meskipun para ahli cenderung sependapat bahwa, perubahan itu selalu mengacu kepada kedua aspek di atas (kemajuan atau pun kemunduran), namun dalam aspek-aspek tertentu sebuah perubahan dapat menimbulkan dampak yang berlainan. Polemik tentang keberadaan TTSB, PORKAS, atau SDSB dapat dijadikan sebagai contoh up-to-date me-

ngenai masalah ini. Secara formal pemerintah telah membuat ketentuan dan peraturan-peraturan tertentu guna mengatasi ekkses-ekses sosial yang mungkin ditimbulkannya. Akan tetapi pelaksanaannya di berbagai daerah sering menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Di satu pihak pemerintah memang berhasil mengumpulkan dana dengan tujuan untuk menunjang peningkatan prestasi olah raga. Namun di pihak lain kemerosotan sikap mental dan moral sebagian besar anggota masyarakat akibat pengedaran kupon SDSB juga semakin dirasakan, terutama oleh kelompok-kelompok humanis dan rohaniawan. Lebih jauh hal tersebut mempengaruhi persepsi masyarakat tentang hakekat judi. Bila pada beberapa tahun yang lalu masyarakat mengkatégorikan suatu perbuatan ke dalam judi atau tidak didasarkan pada sifatnya, maka sekarang didasarkan pada prosedurnya (resmi atau tidak resmi). Hal di atas mengisyaratkan bahwa, telah terjadi perubahan sosio-kultural di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yang mencakup aspek sosial, kebudayaan metrial dan imaterial.

Kalau dileacak secara lebih teliti, terjadinya perubahan sosio-kultural yang demikian rumit dewasa ini, sesungguhnya hal itu tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan faktor penting yang mendorong terjadinya perubahan sosio-kultural. Sejak beberapa abad belakangan ini, ilmu pengetahuan melepaskan diri dari kontekanya yang universal. Seiring dengan itu berbagai cabang ilmu mengalami perkembangan pesat. Akan tetapi perkembangan ilmu yang mengikuti dinamikanya sendiri-sendiri terlepas dari kesadaran dan kebutuhan masyarakat, serta moral, telah menimbulkan berbagai dampak yang beraneka ragam dikemudian hari. Akibatnya ilmu terlepas dari nilainya yang positif, sehingga ilmu berubah menjadi lawan kebijaksanaan atau dikenal de-

ngan ungkapan Wissenschaft als Widersacher der Weisheit.⁷ Akibat dari perkembangan tersebut manusia hidup dalam keterasingan dan ketidakpastian, di tengah-tengah kemajuan yang diraihinya.

Kemajuan yang dicapai umat manusia di bidang ilmu dan teknologi ternyata mempunyai implikasi-implikasi sosial dan budaya. Ilmu hampir-hampir merupakan kekuatan yang otonom yang terlepas dari masyarakat tempat ilmu itu tumbuh dan berkembang. Ketegangan yang terjadi di tengah-tengah peradaban modern sebenarnya juga merupakan dampak yang logis dari usaha-usaha ilmu pengetahuan untuk mendominasi sistem sosial seluruhnya, di mana rasionalisme dijadikan sebagai patokan dalam segala segi kehidupan.⁸

Dalam lapangan ekonomi misalnya, terdapat kecenderungan bahwa sistem ekonomi dewasa ini dengan jelas mewakili rasionalisme. Baik kapitalis Barat maupun sosialis Timur, sebenarnya sama-sama berpegang pada prinsip sekularisasi dan rasionalisasi yang mendalam. Akibatnya agama, estetika, dan etika, kesemuanya tunduk kepada hukum-hukum atau prinsip tersebut. Oleh karena itu orientasi kepada efisiensi merupakan ciri utama ekonomi modern. Dengan meningkatnya industri, Indonesia ternyata tidak mampu terbebas dari proses sejarah seperti di dunia Barat maupun Timur. Masuknya ekonomi dunia ke tengah ekonomi nasional dalam dasawarsa 1970-an dan 1980-an, jelas telah membawa akibat-akibat yang sangat

⁷J.W.M. Bakkers S.J., Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1984), pp. 38-40.

⁸Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat (Jakarta: Rajawali, 1987), p. 84. Sartono Kartodirdjo, Kebudayaan Pembangunan Dalam Perspektif Sejarah (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), p. 140.

jauh dan mendasar. Usaha-usaha besar PMA dan PMDN dengan leluasa bergerak membentuk masyarakat ekonomi baru. Kompetisi antara sektor ekonomi tradisional dengan ekonomi modern menjadi kian terbuka dan berlangsung keras.⁹

Di atas telah dikemukakan bahwa, sistem ekonomi asing (Barat dan Timur) dikembangkan berdasarkan prinsip sekularisasi dan rasionalisasi, berdasarkan pertimbangan itu mustahil mereka mau menanamkan modalnya pada sektor yang tidak akan menguntungkan. Oleh karena modal asing masuk ke sektor-sektor yang paling produktif dari ekonomi negara tuan rumah, maka modal asing akhirnya menggeser modal nasional atau modal yang ada di dalam negeri. Akibatnya modal asing sering menghancurkan modal nasional, apa lagi usaha-usaha domestik yang berkembang sebelumnya.¹⁰ Di satu pihak PMA memang membuka lapangan kerja baru, namun di pihak lain PMA juga mendorong terjadinya PHK karena usaha-usaha dalam negeri yang tidak memiliki modal yang kuat terpaksa ditutup. Akibat sosial dari gejala perkembangan perekonomian seperti di atas, tentu saja berupa dislokasi sosial, pengangguran, dan kriminalitas yang semakin meningkat. Dengan demikian terjadilah perubahan sosio-kultural yg. berdimensi banyak sebagai akibat dari usaha pengembangan perekonomian tersebut.

Teknologi modern sebagai salah satu hasil kebudayaan manusia juga ibarat pisau bermata dua. Di samping memberikan dampak positif, ia juga menimbulkan dampak

⁹Kuntowijoyo, Ibid., p. 85.

¹⁰Arif Budiman "Ilmu Sosial di Indonesia: Perlu-nya Pendekatan Struktural," dalam Krisis Ilmu-ilmu Sosial Dalam Pembangunan Di Dunia Ketiga (Yogyakarta : PUPM. 1984), pp. 162-163.

negatif terhadap manusia dan lingkungannya. Pada gilirannya dampak negatif terhadap lingkungan itu juga akan berpengaruh terhadap sosial budaya masyarakat di sekitarnya.¹¹ Pemanfaatan teknologi modern dalam bidang produksi memang dapat meningkatkan pendapatan, namun jika tidak dikelola dengan baik hal tersebut justru akan menimbulkan dampak negatif yang sulit untuk dicarikan pemecahannya. Kasus semacam ini telah banyak dialami oleh masyarakat di negara-negara maju, di mana teknologi modern telah merusak keseimbangan lingkungan, pencemaran air akibat limbah industri, polusi udara, meningkatkannya pengangguran, dan lain-lain sebagainya.

Masyarakat di negara-negara yang sedang membangun tidak luput dari persoalan seperti itu, bahkan tidak jarang mereka mengalami nasib yang lebih fatal. Hal tersebut terutama karena kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat hanya berusaha untuk meraih keuntungan material, sementara mereka tidak/belum mampu mendayagunakan teknologi modern itu secara wajar. Artinya kemajuan dan penggunaan hasil teknologi canggih, sering tidak didukung oleh skill dan sikap mental dari masyarakat pemakainya. Situasi dan kondisi semacam inilah yang telah menghantarkan masyarakat di berbagai bagian dunia ini hidup dalam keterasingan, di tengah-tengah kemajuan yang mereka capai. Akibatnya mereka dihantui oleh rasa pesimis yang dalam terhadap masa depan mereka sendiri. Pada saatnya hal ini dapat menyebabkan turunnya kreativitas masyarakat, sehingga akan menimbulkan dampak sosio-kultural yang parah.

¹¹ Paul B. Horton and Chester L. Hunt, Sociology (New York: Harper & Row Publisher, Inc., 1976), pp. 460-465.

Didorong oleh keinginan untuk meraih prestise dan keuntungan material, pihak yang berkompeten sering lupa akan dampak negatif dari suatu proses yang sedang berlangsung. Untuk membangun proyek-proyek industri dan pabrik-pabrik besar misalnya, pihak yang berwenang membuka dan mempermudah masuknya modal asing, serta meningkatkan pinjaman luar negeri. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, kebijaksanaan ini secara tidak langsung akan mematikan industri-industri kecil dan rumah tangga yang tidak memiliki modal kuat. Di suatu segi kebijaksanaan di atas memang dapat menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu. Namun di segi lain, sekian banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempat mereka bekerja terpaksa ditutup, sementara mereka tidak mampu bersaing guna mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan besar yang baru dibangun. Apalagi bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan khusus, atau keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut.

Dalam ukuran tertentu masuknya modal asing, memang akan mempercepat proses industrialisasi. Bahkan dapat meningkatkan GNP di suatu negara ke taraf yang menggembarakan. Akan tetapi perkembangan dan kesuksesan itu seringkali hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu, sementara sebagian besar dari masyarakat tidak dapat memetik sesuatu yang berarti dari kemajuan yang telah dicapai. Ketimpangan ini akhirnya akan memperlebar jurang pemisah di antara 'sikaya' dan 'sirisikin.' Situasi dan kondisi seperti itu, bukan hanya akan menimbulkan perubahan sosial yang wajar, melainkan dapat mendorong terjadinya 'revolusi sosial'. Gerakan protes anti Cina di beberapa kota besar di Indonesia di

sekitar tahun 1970-an dan 1980-an, merupakan contoh kongkrit dalam kasus ini. Suatu gerakan protes atau revolusi sudah pasti akan menimbulkan disorganisasi dan diskontinuitas dalam masyarakat. Gejala tersebut tentu akan menimbulkan dampak yang luas di bidang sosial dan kebudayaan.

Di samping itu peningkatan pinjaman luar negeri tanpa pengelolaan yang efektif, tidak akan banyak mendorong ke arah perubahan yang bersifat progress. Akan tetapi hal itu dapat mendorong ke arah kemerosotan sikap mental dan moral pihak-pihak tertentu. Jika demikian yang terjadi, perubahan memang tetap berlangsung tetapi sifatnya adalah regress dan tidak diharapkan. Program-program pembangunan fisik tentu tidak akan berjalan menurut semestinya, sementara bangsa dan negara semakin dililit oleh hutang luar negeri. Akibatnya untuk mencicil hutang tersebut, pihak yang berwenang terpaksa mencari pinjaman baru ke luarnegeri. Bahkan sampai batas tertentu bangsa dan negara bersangkutan tidak mampu lagi membayar hutangnya. Masyarakat dan bangsa Brazil adalah salah satu contoh dari negara yang gagal memanfaatkan pinjaman luar negeri itu, sementara hutang-hutangnya tetap membengkak. Pada gilirannya kasus semacam ini menimbulkan dampak sosio-kultural berupa; kegagalan pembangunan, tidak tersedianya lapangan kerja, peningkatan pengangguran, krisis ekonomi, meningkatnya angka kejahatan, dehumanisasi dan demoralisasi, kemiskinan, dan seterusnya.

Proses pembangunan dan pengembangan industri sesungguhnya adalah suatu aspek dari modernisasi. Telah banyak teori yang dikembangkan sehubungan dengan modernisasi, dan masing-masing teori itu mempunyai kekuatan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Anehnya orang sering terpaksa atau berkiblat pada suatu teori, tanpa meng-

hiraukan kelemahan-kelemahannya. Tidak jarang pihak-pihak tertentu mengambil alih suatu teori yang dinilai berhasil di suatu negara, untuk selanjutnya diterapkan di negara dan bangsanya. Oleh karena teori itu diambil sedemikian saja, tanpa melalui penyesuaian-penyesuaian dengan situasi dan kondisi di mana teori itu akan diterapkan, maka hal tersebut akan menimbulkan berbagai problema sosial dan budaya. Bahkan teori itu mengalami kegagalan sama sekali.¹² Bagaimana pun berbagai faktor yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat perlu dipertimbangkan dalam rangka melancarkan program modernisasi. Bila hal tersebut diabaikan, maka hasil yang diharapkan tidak akan terwujud.

Banyak keritikan yang dilancarkan sementara pihak terhadap pemerintah dan ahli-ahli ilmu sosial di dunia ketiga, karena keinginan mereka untuk meraih prestasi secara cepat, akhirnya mereka lupa memahami situasi sosio-kultural masyarakat yang mereka hadapi. Bahkan dalam batas-batas tertentu mereka mempertentangkan secara tajam antara unsur-unsur tradisional dan modern. Dalam hubungan ini mereka berusaha untuk mengikis segala sesuatu yang berunsur tradisional, untuk kemudian ditukar dengan unsur-unsur modern. Pada hal menurut Weiner, tidak semua yang berunsur tradisional itu akan menghalang modernisasi. Bagaimana pun ada unsur-unsur tradisional tertentu yang dapat diadaptasikan justru akan menunjang, bukan merupakan penghalang modernisasi.¹³

¹² Myron Weiner, ed., Modernisasi: Dinamika Pertumbuhan (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1984), pp. ix-xxi

¹³ Ibid., pp. xiv-xv.

Apabila pendapat Weiner ini diabaikan sama sekali dalam proses pembangunan, maka masyarakat akan selalu dihadapkan pada perbenturan antara nilai-nilai tradisional dan modern dalam berbagai segi kehidupan. Perbenturan nilai tersebut akan menghantarkan masyarakat setempat kepada konflik dan pertentangan, dengan segala implikasinya.

Berbagai kenyataan yang telah disinggung di atas, sudah pasti akan menimbulkan persoalan-persoalan atau problema-problema sosial. Tentu saja hal-hal semacam itu tidak diharapkan kehadirannya. Bahkan masyarakat sesungguhnya tidak mau menerima masalah seperti itu, tetapi ini adalah dampak logis dari suatu perubahan sosio-kultural. Oleh karena perubahan itu sendiri tidak mungkin untuk dielakkan, maka perlu dipertimbangkan dan dicari pemecahan dari kemungkinan dan setiap persoalan yang terjadi.

C. Disorganisasi Sosial

Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan beberapa problema sosial sebagai akibat dari perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat. Hurton dan Hunt mengemukakan, bahwa problema sosial tersebut sesungguhnya adalah merupakan bagian dari perubahan sosial dan kebudayaan.¹⁴ Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa, masyarakat mana pun di dunia ini pasti akan menghadapi problema sosial. Apalagi masyarakat modern yang lebih bersifat dinamis dan gigih untuk mencapai kemajuan dalam berbagai segi kehidupannya, baik dalam lapangan sosial maupun menyangkut kebudayaan.

¹⁴Paul B. Hurton and Chester L. Hunt, op.cit., pp. 502-503.

Problema sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah suatu pertanda terjadinya apa yang disebut disorganisasi. Disorganisasi merupakan suatu keadaan, di mana keserasian sosial di tengah-tengah masyarakat mengalami gangguan. Istilah disorganisasi seringkali berhubungan dengan norma-norma dan nilai-nilai tertentu. Artinya selalu dikaitkan dengan apa yang wajar dan baik, sebagai lawan dari yang tidak wajar dan tidak baik (buruk). Oleh sebab itu, disorganisasi juga dapat dirumuskan sebagai suatu proses berpuasnya nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi panutan masyarakat.

Umumnya orang beranggapan bahwa, disorganisasi dapat terjadi sebagai akibat dari peperangan, revolusi, dan konflik. Meskipun demikian, suatu disorganisasi sesungguhnya juga bisa terjadi akibat kemacetan lalu lintas, banjir, dan lain-lainnya. Berikut akan dicoba menelaah dampak masing-masing peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya disorganisasi tersebut.

Peperangan, di samping membawa kerusakan-kerusakan fisik, juga menimbulkan kerusakan-kerusakan mental dan moral di kalangan masyarakat. Suatu peperangan pertamanya akan mematahkan kontinuitas kehidupan masyarakat, dengan konsekuensi timbulnya improvisasi dari pola-pola kehidupan baru yang tidak mantap. Akibatnya timbul keragu-ruguan dalam kehidupan masyarakat tanpa pedoman¹⁵ yang mapan dan pasti. Gejala semacam itu sudah pasti menyebabkan terjadinya disorganisasi dalam masyarakat bersangkutan.

Sebagaimana peperangan, revolusi dengan segala bentuknya, juga menyebabkan timbulnya disorganisasi so-

¹⁵Koentjaraningrat, op.cit., p. 84.

sial. Revolusi fisik di Indonesia (1945-1949) misalnya, secara politik dapat dinilai berhasil. Melalui perjuangan itu, bangsa Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan RI yang diproklamlirkan pada tgl. 17 Agustus 1945. Walaupun demikian keberhasilan itu juga diiringi oleh terjadinya diskontinuitas dalam masyarakat. Kebanggaan terhadap hasil perjuangan mereka, serta taktik yang mereka lancarkan, mendorong lahirnya nilai-nilai dan norma-norma baru. Bersamaan dengan itu bangsa Indonesia berusaha untuk merombak dan menentang nilai-nilai yang dianggap mengandung unsur-unsur tradisional dan kolonial. Akan tetapi perombakan itu tidak diikuti oleh nilai-nilai baru yang mapan, sehingga keragu-raguan dalam kehidupan tanpa pedoman yang pasti semakin kuat dan jelas.¹⁶ Dengan demikian disorganisasi sosial kian merasuk dalam kehidupan masyarakat.

Di samping peperangan dan revolusi, konflik¹⁷ juga menyebabkan terjadinya disorganisasi. Menurut Dahrendorf, analisis masyarakat dengan menggunakan perspektif konflik bertolak dari kenyataan bahwa, anggota masyarakat dapat dikelompokkan pada dua kategori yaitu; orang yang berkuasa, dan mereka yang dikuasai. Dualisme ini menyangkut struktur dan kehidupan bersama, sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan kepentingan, bahkan

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Lewis A. Coser mengemukakan; konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi. Dalam hubungan ini pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga ingin memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka masing-masing. K.J. Veeger, Realitas Sosial (Jakarta: Gramedia, 1985), p. 211.

saling bertentangan. Pada gilirannya diferensiasi dan pertentangan kepentingan itu dapat menimbulkan perbenturan antar individu atau kelompok.¹⁸ Dalam kasus ini dapat diambil sebagai contoh: -pertentangan antara kaum bangsawan dan rakyat jelata dalam revolusi Perancis; -pertentangan yang berkepanjangan antara kaum pemilik modal (kapitalis) dengan kaum buruh di Eropa (Barat maupun Timur) sejak Revolusi Industri, - dan lain-lain sebagainya. Perbenturan-perbenturan semacam itu merupakan suatu isyarat bahwa, telah terjadi disorganisasi sosial dalam masyarakat di mana konflik itu tumbuh dan berkembang.

Dalam batas-batas tertentu, bencana alam seperti banjir, dan kemacetan lalu lintas juga dapat menyebabkan terjadinya disorganisasi sosial. Bencana alam berupa banjir dapat menimbulkan kerusakan dan kehancuran bagi manusia dan harta miliknya. Jika demikian tentu saja hal itu akan mengundang berbagai problema dalam masyarakat yang ditimpa bencana tersebut. Apabila problema yang terjadi tidak dapat diatasi dengan segera, maka orang akan menempuh jalannya sendiri-sendiri untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya. Guna menjaga kelangsungan hidupnya, orang tidak akan segan-segan berbuat melampaui norma dan peraturan yang berlaku. Artinya orang sudah tidak terikat lagi dengan nilai-nilai atau norma yang mereka anut sebelumnya. Orang tidak akan memikirkan apakah perbuatan itu; baik/buruk, benar atau salah, namun yang penting bagi mereka adalah bagaimana cara mempertahankan hidup. Dalam kasus seperti ini, mungkin saja perampokan, pencurian, pencodongan, dan pembunuhan, merupakan alternatif yang di-

¹⁸ Ibid.

tempuh oleh individu atau kelompok dalam nasyarat tersebut.

Tidak jauh berbeda halnya dengan banjir, kemacetan lalu lintas juga dapat menyebabkan timbulnya disorganisasi. Lalu lintas atau transportasi merupakan faktor esensial dalam masyarakat modern. Kelancaran lalu lintas akan mempermudah proses transformasi barang-barang dan orang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sebaliknya bila terjadi kemacetan lalu lintas, maka akan terjadi berbagai persoalan di kalangan masyarakat. Hal itu dapat mengarah kepada terjadinya disorganisasi sosial, setidak-tidaknya akan dirasakan oleh masyarakat di sekitar kemacetan itu terjadi. Misalkan terjadi kemacetan lalu lintas antara daerah produsen dan konsumen, maka masyarakat di kedua tempat akan menghadapi berbagai masalah ekonomi dan sosial. Di daerah produsen akan terjadi penumpukan barang, sementara di daerah konsumen orang akan kekurangan barang-barang yang diperlukan. Dua masalah yang ditimbulkan oleh sebuah faktor ini dapat mengundang terjadinya disorganisasi di dalam dan antar kedua masyarakat.

Kemacetan lalu lintas tidak selalu disebabkan oleh terlalu banyaknya kendaraan dan bencana alam, maupun tidak tersedianya sarana angkutan, tetapi juga disebabkan oleh mogoknya pengemudi ataupun terjadi peperangan. Sekarang kita ambil contoh kemacetan lalu lintas yang terjadi di beberapa daerah di Sudan Selatan. Sejak beberapa bulan yang lalu Sudan Selatan dikuasai oleh kaum pemberontak, sementara itu bahan makanan masyarakat di sana tidak cukup tersedia. Lantas tidak lama kemudian rakyat diancam bahaya kelaparan, dan wabah penyakit merajalela. Hal terakhir ini telah mengundang simpati berbagai lembaga kemanusiaan (baik yang tergabung di bawah

organisasi PBB, maupun lembaga-lembaga kemanusiaan di beberapa negara), guna membantu meringankan penderitaan rakyat setempat. Namun timbul kesulitan-kesulitan untuk mengirimkan bantuan, karena keamanan ke kawasan itu tidak terjamin. Baik pemerintah atau pun pemberontak melihatannya kurang mendukung supaya program itu berjalan lancar. Oleh karena lalu lintas (udara maupun darat) sering terganggu, bahkan sengaja dihancurkan oleh pihak-pihak yang berperang, maka bahan makanan dan obat-obatan yang tersedia tidak mencapai sasaran. Bahkan bantuan yang dikirim lewat jalan darat sering dicuri oleh oknum-oknum pemerintah ataupun pemberontak. Akibatnya rakyat di berbagai tempat di Sudan Selatan menghadapi bahaya kelaparan dan wabah penyakit yang amat parah. Dalam suasana demikian jika ada bantuan yang mencapai tempat yang dituju, maka masyarakat saling berebutan untuk memperoleh pembagian. Dalam banyak kasus orang tidak segan-segan lagi merampok dan mencuri jatah orang lain, dan kalau perlu membunuh individu lainnya guna mempertahankan hidupnya. Kasus-kasus semacam itu dapat kita ketahui dari berbagai liputan masmedia, di mana rakyat mengalami penderitaan yang amat pahit untuk mempertahankan hidupnya masing-masing. Berbagai problema yang dikemukakan di atas, jelas membawa dampak sosial yang kompleks, di samping terjadinya disorganisasi yang begitu parah.

Sejauh ini kita telah menelaah beberapa persoalan di sekitar disorganisasi, dengan menitikberatkan tinjauan pada sebab-sebab alamiah dan lahiriah dari proses terjadinya disorganisasi. Bila kita meninjau masyarakat dengan menggunakan perspektif kebudayaan, maka faktor budaya pun dapat menimbulkan terjadinya disorganisasi. Hampir dapat dipastikan bahwa, tidak ada suatu

masyarakat pun di zaman modern ini yang terbebas sama sekali dari pengaruh unsur-unsur budaya asing (luar). Proses saling mengambil dan akulturasi kebudayaan dalam setiap masyarakat telah berlangsung dengan hebat sekali hingga abad ini. Sebelum mencapai kemapan berbagai unsur kebudayaan yang diambil dari luar, tentu setidaknya tidaknya mereka dihadapkan kepada dua unsur kebudayaan, nilai, ataupun norma. Apabila suatu masyarakat dihadapkan kepada dua pilihan yang berbeda yang sama kuat pengaruhnya, maka hampir dapat dipastikan akan terjadi apa yang disebut disorganisasi. Hal tersebut akan berlangsung terus selama proses akulturasi belum tercapai. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini, perbenturan antara nilai-nilai dan norma-norma adat Minangkabau dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam yang datang dari luar. Dalam hubungan ini telah terjadi disorganisasi dalam masyarakat Minangkabau yang memakan waktu yang cukup panjang. Akhirnya kedua unsur itu bermuara pada penyesuaian antara keduanya, sehingga terwujud apa yang disebut; 'syarak mangato, adat mamakai,' atau 'adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.' Dengan demikian disorganisasi yang terjadi di kalangan masyarakat Minangkabau, secara bertahap dapat berkurang.

Di samping itu bila bertemu dua unsur kebudayaan dalam masyarakat, di mana salah satu unsur lebih lemah dari yang lainnya, maka efeknya berupa disorganisasi tidak begitu rumit. Dalam kasus semacam ini, tentu unsur-unsur yang lebih kuat akan mendominasi yang lemah. Kalau pun ada dampaknya dalam bentuk disorganisasi, maka dengan segera permasalahan tersebut akan teratasi, sebab dengan cepat anggota masyarakat akan dapat menjatuhkan pilihannya. Menolak unsur-unsur yang tidak relevan, dan mengambil unsur-unsur yang sesuai dengan kebutuhan me-

reka. Kalau keputusan yang disebut belakangan ini telah tercapai, tentu disorganisasi akan segera berakhir dalam masyarakat setempat.

Dalam banyak hal, perbenturan antara tradisi dan modernisasi telah mengakibatkan terjadinya disorganisasi sosial. Meskipun kedua padanan itu tidak selalu bertentangan, namun dalam berbagai aspek masyarakat tradisional dan modern memiliki prinsip-prinsip dan pandangan yang sangat berbeda. Perbedaan-perbedaan itu misalnya berkisar tentang hakekat hidup, karya, waktu, dan sebagainya, dalam kedua tipe masyarakat. Dalam rangka memacu pembangunan dan modernisasi, tidak jarang ditemukan golongan masyarakat yang terombang-ambing di antara tradisionalisme dan modernisme.

Di dunia ketiga (negara-negara yang sedang membangun) gejala semacam itu, sering menjadi penghalang untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan/digariskan. Pembangunan telah membawa masyarakat ke era modernisasi, sementara sebelah kakinya tetap terkait pada tradisionalisme. Dengan kata lain proses modernisasi tidak didukung nilai-nilai yang seharusnya, tetapi terjerat dalam nilai-nilai tradisional (tradisionalisme). Sikap mental menerabas yang dianut individu atau oknum-oknum tertentu dalam masyarakat modern, adalah perwujudan dari tradisionalisme yang merasuk kedalam proses modernisasi. Korupsi dan manipulasi adalah contoh menarik mengenai kasus ini, yang banyak terjadi dalam sistem birokrasi modern (terutama di negara-negara terbelakang atau underdevelopment). Kasus ini dan bermacam-macam kasus lain yang sepadan dengan itu yang dialami berbagai masyarakat/bangsa, tentu menimbulkan berbagai dampak sosial dan kebudayaan. Akibatnya keraguan tanpa pedoman yang pasti makin dirasakan masya-

rakat setempat, sehingga disorganisasi tidak dapat dihindarkan lagi. Dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti itu, masyarakat/bangsa bersangkutan memerlukan nilai-nilai dan norma-norma baru yang mapan dalam rangka mengatasi disorganisasi yang tengah berlangsung. Seandainya anggota masyarakat tidak mampu menemukan nilai-nilai baru, serta tidak menetapkan pilihan yang pasti, maka gejala tersebut akan tetap membayangi kehidupan masyarakat setempat.

D. Penyesuaian Sosial

Sejauh ini kita telah mencoba menelaah perubahan sosio-kultural dengan berbagai persoalan yang terkait dengan konsep tersebut. Kemudian sebelum masuk kedalam inti sub-bab ini, mungkin perlu dijawab terlebih dulu, dua pertanyaan pokok, sehubungan dengan apa yang telah disinggung pada bagian terdahulu. Kedua pertanyaan dimaksud adalah sebagai berikut: dapatkah proses perubahan sosial dan kebudayaan berlangsung tanpa mengalami dampak sosial ?; perlukah perubahan sosio-kultural dihindarkan oleh masyarakat ?.

Suatu proses modernisasi biasanya membutuhkan perubahan-perubahan, baik di bidang sosial atau pun kebudayaan masyarakat bersangkutan. Sulit untuk membayangkan suatu perubahan yang tidak mempunyai dampak sosial dan kebudayaan. Sebelum dan selama proses perubahan biasanya anggota masyarakat dihadapkan pada masalah disorganisasi, hanya saja tarafnya akan berbeda dalam setiap perubahan di masing-masing masyarakat. Oleh karena itu, disorganisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan untuk mencapai kemajuan, apalagi mengingat perkembangan setiap unsur kebudayaan tidak selalu

berjalan sejajar. Perkembangan teknologi sebagai hasil kebudayaan manusia cenderung lebih cepat, dibandingkan dengan perkembangan sikap mental masyarakat pemakai peralatan tersebut. Di samping itu ilmu pengetahuan modern yang dikembangkan atas prinsip dan ideologi tertentu, jelas akan menimbulkan berbagai masalah bila hanya diambil dan ditransfer ke tengah-tengah masyarakat tradisional dan sedang membangun tanpa menyaringnya dengan filter tertentu.

Kemudian dalam rangka menjawab pertanyaan kedua, perlu ditegaskan di sini; bahwa perubahan sosio-kultural tidak perlu ditakuti dan dihindarkan oleh masyarakat, terutama bagi yang hendak mencapai kemajuan. Bila masyarakat takut akan terjadi perubahan-perubahan dan selalu ingin menjaga kestabilan, maka hampir dapat dipastikan perkembangan masyarakat tersebut akan berlangsung secara lambat. Oleh karena itu untuk mencapai kemajuan dan modernisasi, suatu masyarakat harus berani melakukan perubahan-perubahan (yang bersifat progress), meskipun pada awalnya akan menimbulkan berbagai dampak sosial. Kemudian setelah melalui proses penyesuaian-penyesuaian, maka masyarakat tersebut akan kembali stabil. Artinya dampak sosial itu tidak harus dihindari, tetapi harus dicari pemecahannya (diatasi).

Perubahan dalam struktur kehidupan manusia, tentu akan membawa akibat pada perubahan hubungan antar satuan sosial, dengan sendirinya keseimbangan dalam masyarakat akan terganggu untuk waktu tertentu. Gangguan terhadap keseimbangan itu terjadi karena setiap perubahan sikap pada suatu satuan sosial akan meminta perubahan sikap dalam satuan sosial lainnya. Akibatnya seluruh pola sosial masyarakat tersebut ikut berubah. Dalam perubahan yang multikompleks ini, dengan sendirinya akan

menghantarkan masyarakat kepada dua kemungkinan, yaitu: "(a) bahwa manusia menemukan sistem nilai dan falsafah hidup yang baru dan atau; (b) manusia tenggelam dalam persoalan-persoalan yang dihadapinya dan tidak dapat mengambil sikap (=keputusan) terhadap keadaan baru."¹⁹

Apa bila anggota masyarakat dapat mengambil langkah pertama, berarti mereka dapat mengatasi krisis atau disintegrasi melalui penetapan/pengambilan suatu keputusan. Hal itu berarti bahwa masyarakat akan segera mencapai kestabilan kembali, setelah berhasil mengatasi masalah yang mereka hadapi. Sebaliknya bila masyarakat itu tidak berhasil mencapai kemungkinan pertama, dengan sendirinya mereka akan jatuh pada kemungkinan kedua. Seandainya hal tersebut terjadi maka akan timbul/menyusul berbagai problema sosial yang tidak diharapkan. Situasi dan kondisi seperti ini dapat menimbulkan sikap apatis di kalangan masyarakat. Bahkan dalam batas-batas tertentu dapat mengakibatkan perubahan sosio-kultural yang bersifat regress.

Perubahan sosial yang bersifat kemajuan atau reformis, hanya akan mudah terwujud dalam masyarakat yang dinamis. Masyarakat tipe ini akan mudah mengambil sikap (menolak atau menerima) perkembangan baru, sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Jika anggota masyarakat itu menerima unsur-unsur baru tersebut, berarti mereka harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Implikasinya adalah, bahwa penerimaan nilai-nilai dan norma baru itu, tentu dalam beberapa hal mereka harus meninggalkan nilai dan norma yang berlaku sebelumnya. Untuk

¹⁹Phil Astrid S. Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial (Bandung: Binacipta, 1983), p.158.

mengatasi kemungkinan-kemungkinan persoalan yang akan ditimbulkannya, maka masyarakat itu membutuhkan terciptanya re-integrasi:

Kenyataan memang menunjukkan bahwa, perubahan sosio-kultural cenderung menimbulkan persoalan-persoalan, khususnya di dalam masyarakat yang sedang mengalami proses perubahan itu. Suatu perubahan sering ditandai dengan terganggunya kestabilan masyarakat. Di antara gejala-gejala yang timbul dapat berupa; depersonalisasi, adanya frustrasi dan apati (kelumpuhan mental), pertentangan dan perbedaan pendapat mengenai nilai dan norma yang sudah dianggap mutlak sebelumnya, dan adanya jurang pengertian antar generasi.²⁰ Dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebutlah dibutuhkan integrasi sosio-kultural, guna mewujudkan penyesuaian-penyesuaian.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka konsep integrasi merupakan konsep penting dalam memahami penyesuaian sosial. Dengan integrasi sosial dimaksudkan adalah, terbinanya perinsip-perinsip kaitan antar berbagai unsur masyarakat, di mana masing-masing unsur dapat menjalankan perenannya sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama.²¹ Perlunya integrasi tersebut didasarkan atas keyakinan akan perlunya interdependensi antar berbagai unsur sosial atau masyarakat. Orang dengan sendirinya tetap berikhtiar agar kesatuan dan keutuhan masyarakat itu tidak terganggu. Kalaupun mendapat gangguan, para anggota masyarakat tetap berupaya supaya keutuhan terwujud kembali. Faktor ini adalah penting dalam mendorong ke arah terlaksananya penyesuaian-penyesuaian sosio-kultural.

²⁰ Ibid., p. 157.

²¹ Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi (Ja-

Sebelum memasuki uraian tentang integrasi di bidang kebudayaan, perlu ditegaskan terlebih dahulu pengertian mengenai culture (kebudayaan) itu. Menurut Antropologi Budaya dan Antropologi Sosial, kebudayaan dapat diartikan sebagai "keseluruhan gagasan, tingkah laku, dan hasil karya manusia yang terhimpun sejak awal makhluk manusia itu berevolusi di muka bumi ini hingga sekarang, yang dijadikan manusia menjadi milik dirinya melalui proses belajar."²² Batasan ini menunjukkan bahwa berbagai unsur kebudayaan (material maupun imaterial) dapat berubah dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan manusia itu sendiri. Di samping itu unsur-unsur kebudayaan itu dapat dipelajari oleh individu atau pun masyarakat guna dibudayakan dan dijadikan sebagai miliknya. Sebelum hal terakhir ini terwujud berarti individu atau masyarakat bersangkutan berhadapan dengan dua sistem nilai berbeda, keadaan semacam ini cenderung menyebabkan terjadinya disintegrasi. Disintegrasi tersebut akan berjalan terus selama masyarakat bersangkutan belum mampu menetapkan pilihannya.

Gejala di atas akan lebih mudah dipahami dengan mengikuti rumusan berikut. Dengan menggunakan perspektif dan konsep historis, Ignas Kleden sampai kepada suatu rumusan kebudayaan yang sangat menarik. Menurutnya, kebudayaan dapat dikatakan sebagai dialektik antara ketenangan dan kegelisahan, antara integrasi dan disintegrasi, serta antara tradisi dan reformasi.²³ Masing-ma-

karta: Aksara Baru, 1980), pp. 186-191.

²²Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi Sosial dan Budaya: ADPE4210/3SKS/MODUL 1-5 (Jakarta: Karunika, 1986), p. 3.2.

²³Ignas Kleden, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan (Jakarta: LP3ES, 1987), p. 214.

sing dimensi kebudayaan itu sesungguhnya sama-sama dibutuhkan atau diperlukan. Artinya tanpa dialektik antar kedua unsur yang saling berbeda itu, masyarakat dan kebudayaan tidak akan mengalami perkembangan yang berarti.

Reformasi dan perubahan dalam segala bentuknya memang sering mengganggu kestabilan masyarakat, bahkan dalam batas-batas tertentu menuntut perombakan tradisi yg dianut sebelumnya. Akibatnya hampir setiap proses perubahan tidak terbebas dari disintegrasi dan disorganisasi, terutama selama periode itu berlangsung. Oleh karena hal ini adalah dampak logis dari suatu reformasi, maka hal tersebut harus dilalui dan dicarikan pemecahannya oleh masyarakat bersangkutan. Sebaliknya kecenderungan dan sikap selalu ingin memelihara ketenangan, integrasi, dan tradisi, tidak akan mampu menunjang perkembangan masyarakat dalam berbagai segi kehidupannya.

Sehubungan dengan kasus terakhir ini, pengalaman rakyat dan bangsa Birma di bawah pemerintahan Newin, cukup memberikan pelajaran berharga. Politik menutup diri dari pengaruh asing dan ingin mempertahankan tradisi, serta untuk mempertahankan kestabilan sosial dan kebudayaannya, ternyata telah menghantarkan bangsa dan negara itu ke ambang kehancurannya. Kalau sebelumnya Birma merupakan negara penting dan perlu diperhitungkan di Asia Tenggara, sekarang hidup dalam kegoncangan dan keterasingan. Dengan demikian tradisionalisme, ketenangan dan integrasi yang dipeliharanya selama ini, kini harus dibayar dengan pengorbanan berupa kehancuran socio-politik, sosio-ekonomi, dan sosio-budaya. Kebijakan yang ditempuh Newin ternyata mengalami kegagalan dalam membawa bangsa dan negaranya kepada kemajuan. Bahkan para pengamat menilai Birma mengalami kemunduran dalam berbagai bidang, setidaknya-tidaknya tidak mengalami

perkembangan sesuai dengan apa yang diharapkan pemimpin negara itu sebelumnya.

Bertolak dari pengalaman di atas juga perlu ditegaskan bahwa, tradisi dan integrasi memang merupakan faktor penting dalam reformasi dan modernisasi. Bagaimanapun, tanpa tradisi dan integrasi, suatu kebudayaan akan kehilangan identitasnya. Sementara itu, tanpa reformasi dan desintegrasi suatu kebudayaan akan kehilangan kemungkinan untuk berkembang, untuk memperbaharui diri, atau untuk menyesuaikan diri dengan paksaan perubahan sosial.²⁴

Banyak reformasi dan pembangunan tanpa mempertimbangkan unsur-unsur tradisional, diakhiri dengan kegagalan tragis. Hal semacam itu telah dialami oleh berbagai masyarakat, baik dalam skala kecil, maupun dalam skala yang lebih luas yaitu bangsa. Bangsa Cina misalnya, di bawah Revolusi Kebudayaan berusaha untuk menolak/menghancurkan unsur-unsur dan nilai-nilai tradisional dalam rangka melancarkan program reformasi, ternyata berakhir dengan kegagalan. Demikian pula halnya dengan pemerintah dan bangsa Vietnam, yang sangat tertarik kepada prinsip dan metode yang berasal dari luar, serta mencoba mengabaikan unsur-unsur dan nilai-nilai tradisional. Akhirnya Vietnam mengalami nasib yang tidak jauh berbeda dengan Cina selama Revolusi Kebudayaan. Bahkan kedua bangsa tersebut hampir saja kehilangan identitas kebudayaannya. Setelah menyadari akan bahaya kebijaksanaan seperti itu, kemudian pemerintah di kedua negara kembali melancarkan penataan-penataan dan penyesuaian dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negaranya masing-masing.

²⁴Ibid.

Kecenderungan semacam itu juga pernah tumbuh di kalangan masyarakat dan bangsa Indonesia, baik pada zaman kolonial maupun setelah Indonesia mencapai kemerdekaan. Novel sebagai salah satu refleksi sosial dan budaya cukup banyak mengungkapkan kecenderungan individu atau kelompok sosial tertentu untuk membuang atau menolak semua unsur dan nilai tradisional, serta menggantinya dengan unsur dan nilai-nilai yang datang dari luar. Gejala seperti ini antara lain dapat kita petik dari novel Salah Asuhan, "Rancak Dilabuh," dan sejenisnya.

Dalam membangun kebudayaan Indonesia modern, masih banyak keinginan untuk menolak semua unsur-unsur dan nilai-nilai tradisional. Keinginan semacam ini dapat diikuti dari polemik kebudayaan yang memuncak di sekitar tahun 1950-an. Demikian pula di zaman pemerintahan Orde Lama, bangsa Indonesia hampir saja kehilangan identitasnya, tenggelam di bawah arus MANIPOL-USDEK yang dimotori oleh kaki-tangan Komunis. Bahkan Pancasila yang merupakan dasar ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, diperas sedemikian rupa sehingga menjadi Eka-sila. Ancaman tersebut berakhir dengan jatuhnya pemerintahan Orde Lama setelah gagalnya pemberontakan G30S/PKI th 1965. Tidak lama kemudian pemerintahan Orde Baru terbentuk, yang dengan segera melancarkan berbagai kebijaksanaan berupa re-organisasi dan re-integrasi dalam berbagai segi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Seiring dengan itu, Pancasila dapat kembali kepada posisi dan fungsinya semula.

Bertolak dari pengalaman sejarah dan dengan memahami berbagai dampak modernisasi dan pembangunan, maka pemerintah dewasa ini sudah menunjukkan berbagai kewaspadaan. Semua unsur tradisional yang dapat menunjang pem-

bangunan didorong perkembangannya ke arah yang lebih positif. Dengan demikian berbagai unsur tradisional dan modern dapat saling menunjang aspek-aspek tertentu dalam pembangunan. Melalui kebijaksanaan ini pemerintah berharap agar program modernisasi tidak menimbulkan gangguan yang berarti dalam lapangan sosial dan budaya. Dalam kaitan ini pemerintah sekarang sedang giat melancarkan program pembangunan yang berwawaskan lingkungan. Untuk ukuran tertentu kebijaksanaan-kebijaksanaan itu, ternyata telah menunjukkan hasil yang positif untuk mengurangi ekseseks pembangunan. Dengan demikian penyesuaian-penyesuaian dalam bidang sosio-kultural lebih mudah diwujudkan, dibandingkan dengan pengalaman dan kenyataan yang dialami bangsa Indonesia sebelum ini.

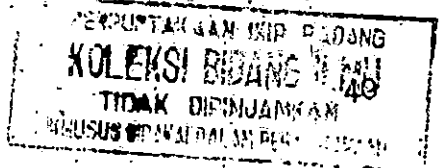
Walaupun dalam beberapa hal telah tercapai berbagai kemajuan, namun bukan berarti semua persoalan telah dapat diatasi. Bagaimana pun masyarakat dan bangsa Indonesia dewasa ini masih dalam taraf transisi, yaitu bergerak dari masyarakat agraris yang tradisional menuju masyarakat industri yang modern. Dalam masa transisi, selalu saja terdapat kecenderungan masyarakat terombang-ambing diantara nilai jelek dan bagus. Keadaan ini mendorong tumbuh dan berkembangnya sikap ambivalen (serba mendua). Dalam birokrasi misalnya, orang dihadapkan kepada tuntutan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan kewajibannya, namun dipihak lain individu tersebut juga didesak untuk meraih keuntungan-keuntungan pribadi. Di hadapan kepada keadaan seperti itu, orang sering lupa dengan tugas dan kewajibannya, sehingga dia tidak jarang melakukan tindakan-tindakan ilegal (menerabas) untuk memenuhi nafsu dan keinginannya. Dalam menghadapi kasus semacam ini, diperlukan adanya idealisme, sebab tanpa faktor itu modernisasi akan macet. Idealisme dapat mem-

berikan aspirasi dan inspirasi pembangunan. Kita perlu membudayakan sikap integrasi, otoritas, dan otentisitas. Ini kondisi mutlak yang harus dipenuhi, dan tidak dapat dikesampingkan dalam mencapai kemajuan. Kita harus bergerak meninggalkan orientasi pada status,²⁵ dan menggantinya dengan nilai budaya yang berorientasi pada hasil.²⁶

Berbicara mengenai masalah orientasi nilai budaya, berarti kita memasuki tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari kebudayaan. Sistem nilai budaya yang di dalam terma Indonesia lebih dikenal dengan 'adat - istiadat', tidak lain adalah merupakan wujud ideal dari setiap kebudayaan. Suatu sistem budaya mencakup konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat tentang apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, yang berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan warga masyarakat tersebut. Lebih jauh sistem nilai budaya yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, justru akan mempengaruhi perkembangan kebudayaan fisik masyarakat setempat.²⁷

²⁵Sartono Kartodirdjo, "Masa Transisi Akan Berlangsung Lama," KOMPAS No. 239 Tahun Ke-24, (27 Februari, 1989).

²⁶Untuk merubah nilai budaya masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern memang bukanlah suatu persoalan yang gampang. Proses pembangunan yang tengah berlangsung di dalam negara dan bangsa Indonesia dewasa ini, ternyata belum didukung sepenuhnya oleh nilai-nilai yang sewajarnya (seharusnya). Moctar Lubis menyingkap ciri-ciri negatif yang masih menghinggap sebagian besar masyarakat Indonesia, yang diduga menjadi momok dalam pembangunan. Di antara ciri-ciri tersebut adalah: hipokritis; tidak bertanggungjawab; feodalistik; percaya kepada tahyul dan kurang logis; berkarakter lemah atau tidak kuat pada prinsip dan keyakinan-



Sesuai dengan sifatnya, nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional dari alam jiwa para individu yang mendukung kebudayaan tertentu. Semenjak kecil, individu-individu dalam masyarakat sesungguhnya telah diresapi melalui proses sosialisasi oleh nilai-nilai budaya di tempat dia lahir dan dibesarkan. Dengan demikian konsep nilai budaya tersebut telah mulai mengakar di dalam jiwa setiap individu di dalam masyarakat tersebut. Itu lah sebabnya nilai budaya dalam setiap kebudayaan tidak dapat diganti dengan nilai budaya lain dalam waktu yang singkat.²⁸ Sebaliknya unsur-unsur kebudayaan fisik dari suatu masyarakat dapat dengan mudah ditranfer ke dalam masyarakat lain, apa lagi kalau didukung oleh dana yang memadai.

Bertolak dari konsepsi dan pemikiran di atas, tidak jarang proses pembangunan dan modernisasi dalam suatu masyarakat terbentur pada persoalan-persoalan yang rumit dan sulit dicarikan pemecahannya. Di suatu pihak muncul gagasan dan keinginan dari sebagian (minoritas) anggota masyarakat untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan dari masyarakat atau bangsa lain. Namun di pihak lain, mentalitas sebagian besar anggota masyarakatnya

nya; boros atau konsumtif; tidak mau bekerja keras atas kesediaan sendiri; orientasi pada status, bukan pada hasil dan kuarang berminat berwiraswasta; ingin cepat kaya dan berhasil, tanpa ditunjang oleh usaha-usaha keras dan sungguh-sungguh; tidak terbuka; iri dan dengki terhadap kesuksesan orang lain; mudah puas dan berbangga diri; berkepribadian lemah dan kurang yakin terhadap kemampuan dan milik sendiri; pemalas; lemah dalam mengaitkan sebab dan akibat atau tidak realistis; kurang peduli dengan nasib orang lain dalam mengambil dan melakukan tindakan-tindakannya; dan sebagainya. Selama ciri-ciri tersebut masih mendominasi masyarakat Indonesia, selama itu pula kepincangan-kepincangan dalam pembangunan akan tetap berlangsung. Mochtar Lubis, Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban, Jakarta: Idayu: 1981, pp. 23-50.

belum atau tidak mendukung proses yang sedang berlangsung. Kenyataan semacam itu akan terasa kian menghin-pit, terutama dengan masuknya sistem teknologi dan ber-bagai unsur kebudayaan asing ke dalam masyarakat tradi-sional yang sedang membangun. Bagaimana pun keadaannya, tanpa mau menerima unsur-unsur budaya asing, justru ke-majuan yang didambakan itu hampir-hampir tidak mungkin akan terwujud.

Menghadapi dualisme di atas, satu-satunya jalan yg harus ditempuh adalah penyesuaian sosial dan integrasi kebudayaan. Maksudnya, bila suatu unsur kebudayaan asing ditranfer untuk mendukung proses modernisasi, maka harus diikuti dengan berbagai perubahan dari masyarakat dan ke-budayaan penerima. Dengan demikian, betul-betul terjadi perubahan yang bersifat struktural di kalangan masyara-kat dan kebudayaan setempat. Lebih tegas lagi, jika ter-jadi perubahan dalam unsur-unsur kebudayaan fisik, ha-rus selalu disesuaikan dengan perubahan-perubahan di da-lam sistem budaya dan sistem sosial masyarakat yang te-ngah mengalami proses perubahan itu. Sementara itu ni-lai budaya yang bukan merupakan faktor penghalang dan diperkirakan dapat mencegah dampak negatif dari suatu perubahan, harus tetap dipertahankan. Hanya dengan ja-lan seperti itu lah suatu perubahan akan membawa makna positif bagi perkembangan masyarakat dan kebudayaan ter-tentu. Seandainya hal tersebut diabaikan, maka berba-gai persoalan sebagai akibat dari perubahan itu tidak akan dapat dihindarkan lagi.

²⁷ Kuntowijoyo, op.cit., pp. 189-190.

²⁸ Ibid., p. 190.

Dalam proses pembangunan dan era modernisasi dewasa ini, masyarakat dan bangsa Indonesia memang telah mencapai banyak kemajuan, terutama di bidang pembangunan fisik. Perubahan-perubahan memang sedang berlangsung dalam skala dan kecepatan yang menakjubkan. Namun jika ditelusuri dengan lebih cermat dan teliti, kita akan segera menyadari bahwa perubahan struktural dan perubahan kultural ternyata memang tidak sejajar. Akibatnya terjadi anomie dalam perangkat nilai di tengah-tengah masyarakat. Kuntowijoyo seorang sejarawan muda Universitas Gajah Mada berpendapat bahwa;

"anomie terjadi karena kesenjangan antara industrialisasi, teknologisasi, dan urbanisasi di satu pihak, dengan konservatisisme budaya tradisional di lain pihak. Industrialisasi telah melahirkan budaya massa yang mengarah ke semangat kolektif dalam tata nilai, teknologisasi telah membuat penerapan metode teknik dalam segala bidang, dan urbanisasi telah menyebabkan runtuhnya nilai-nilai komunal masyarakat tradisional." ²⁹

Dewasa ini gejala tentang terjadinya anomie tersebut, ternyata sudah semakin merasuk ke dalam berbagai kelompok masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada masyarakat perkotaan (urban society), tetapi di dalam masyarakat pedesaan (rural society) pun keadaannya tidak lebih baik. Hal itu tentu tidak terlepas kaitannya dengan kemajuan dan perkembangan transportasi dan komunikasi, sehingga jarak dan perbedaan antara kedua masyarakat itu sudah semakin kabur. Akhir-akhir ini Televisi dan Video telah banyak dapat dimanfaatkan (dinikmati) oleh masyarakat desa, apa lagi setelah "Program Listrik Masuk Desa" berhasil dengan sukses. Melalui kedua jenis produk teknologi ini saja pun,

²⁹ Ibid., p. 11.

bermacam-macam unsur kebudayaan asing menjalar sampai ke pelosok-pelosok desa, dan dikonsumsi oleh anggota masyarakat dari berbagai tingkat usia. Anggota masyarakat yang tidak mempunyai mentalitas yang kokoh dan tidak percaya akan milik sendiri, cenderung untuk meniru unsur-unsur yang datang dari luar itu, tanpa mempertimbangkan segi baik atau buruknya. Unsur-unsur budaya tradisional mulai ditinggalkan dan ditiru unsur-unsur luar, yang dalam banyak hal sangat berbeda dengan nilai budaya sebelumnya. Timbulnya kecenderungan terhadap praktek-praktek pergaulan bebas, sadisme, budaya acuh, dan sejenisnya, di kalangan generasi muda dalam berbagai kelompok masyarakat diduga ada kaitannya dengan masuknya pengaruh budaya asing secara besar-besaran.

Kecenderungan seperti di atas, pada gilirannya tentu akan mencemari/merusak citra keberhasilan pembangunan yang telah dicapai sejauh ini. Oleh karena itu anomie mutlak harus ditanggulangi secara serius (sungguh-sungguh), sebagaimana juga perhatian dan usaha yang dilakukan untuk memacu pembangunan fisik. Jika tidak, maka dalam era 'tinggal landas' (take off) masalah itu akan menjadi semakin parah dan rumit, sehingga sulit untuk dicarikan pemecahannya. Dalam kaitan ini pembangunan yang seimbang antara "mental-spiritual dan fisik-material" mutlak harus direalisasikan, bukan hanya menjadi 'buah bibir' belaka. Bagaimana pun, sifat hipokritis yang dipertahankan sementara pihak, adalah merupakan ancaman utama dalam usaha-usaha ini.

Budaya yang merupakan suatu sistem ide dan nilai yang dikaitkan bersama secara logis, haruslah menjadi mekanisme integrasi. Dengan demikian, baik keseluruhan maupun aspek-aspek budaya itu betul-betul menjadi ke-

satuan integral. Guna kepentingan ini Paul Tillich mengajukan konsepnya mengenai theonomy. Menurut konsepsi ini, dalam setiap proses pembangunan bentuk-bentuk yang otonom harus dipadukan dengan nilai-nilai transendental yang mendukungnya. Dengan kata lain, nilai-nilai yang serba universal harus dipadukan dengan tuntutan-tuntutan situasi yang bersifat khusus, sehingga efek negatif yang mungkin timbul akibat pembangunan, dapat ditekan ke tingkat yang paling rendah.³⁰

Khususnya bagi kita bangsa Indonesia, konsepsi seperti yang dikemukakan oleh Tillich itu sesungguhnya telah termaktup di dalam ideologi dan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila. Hal itu pun cukup didukung oleh nilai-nilai keagamaan yang hidup dan tumbuh di Indonesia, di mana tidak satu agama pun yang memihak kepada keterkebelakangan dan kemiskinan. Permasalahannya sekarang adalah, bagaimana kita harus berbuat dan bertindak agar konsep ideal itu dapat 'dibumikan' (dalam arti dapat direalisasikan) dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bermanfaat untuk pembangunan dan modernisasi. Untuk kepentingan ini, kita harus mengembangkan virus mental yang dikenal dengan n Ach (kependekan dari need for Achievement) kebutuhan untuk meraih hasil dan prestasi. Seiring dengan itu, konservatisisme, tradisionalisme (bukan tradisional), serta berbagai sikap mental yang dapat menghalangi pembangunan, harus ditinggalkan. Pekerjaan ini memang sulit, tetapi bukan berarti hal itu tidak mungkin diwujudkan.

Berdasarkan uraian terdahulu, jelaslah bahwa kebudayaan merupakan formasi yang bagian-bagiannya saling

³⁰ Ibid., pp. 100-101.

berkaitan. Sebelum semua unsur-unsur itu menjadi universal dan bersatu, terlebih dahulu harus dilalui proses penyesuaian-penyesuaian dan integrasi. Dengan demikian suatu kebudayaan itu betul-betul bersifat integral, dibangun oleh berbagai unsur yang saling menopang, serta menjadi milik mayoritas anggota masyarakat atau kelompok sosial (bukan hanya milik elite tertentu).

Gejala saling sesuaikan-menyesuaikan antara unsur-unsur kebudayaan itu disebut integrasi. Proses integrasi tersebut tidak lain adalah perkembangan progresif dalam rangka mewujudkan penyesuaian yang sempurna antar berbagai unsurnya yang secara bersama menunjukkan total culture,³¹ sehingga akhirnya ia mendapat dukungan dari semua kelompok sosial dalam masyarakat. Dalam konsepsi ini lah perlunya perkembangan yang sejajar antara semua unsur kebudayaan dan sosial, sehingga perkembangan yang dicapai dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.³² Artinya perubahan sosio-kultural (terutama yang diprogramkan), tidak akan membawa dampak yang fatal bagi kehidupan dan ketuhanan masyarakat setempat.

³¹Ralph Linton, The Study of Man, terjemahan Firmansyah (Bandung: Jemmars, 1984), p. 266.

³²Bandingkan dengan proses pembangunan, reformasi, dan modernisasi Jepang. Kemudian Taiwan dan Korea Selatan, yang keduanya mampu menjadi negara industri baru atau dalam istilah lain dikenal juga dengan 'Macan Asia.' Tanpa memutuskan kontinuitasnya dengan budaya tradisional masing-masing, masyarakat di negara-negara itu dapat mencapai kemajuan yang menakjubkan. Bangsa-bangsa tersebut mampu memanfaatkan atau mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada mulanya diimpor dari luar, kemudian diproses menjadi milik mereka sendiri. Pembangunan, reformasi, dan modernisasi yang dilancarkan oleh Jepang, Korea, maupun Taiwan ditopang oleh dua nilai budaya sekaligus yaitu tradisional dan modern. Dengan demikian kemajuan dan kesuksesan ketiga

Pada bagian akhir uraian ini perlu ditegaskan kembali bahwa, perubahan sosio-kultural adalah faktor penting guna mencapai kemajuan-kemajuan. Bagi bangsa Indonesia yang sedang bergerak (menata diri) dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri (dalam rangka mencapai program tinggal landas) misalnya, diperlukan perubahan-perubahan struktural dan kultural yang bersifat mendasar. Tanpa usaha-usaha semacam itu, maka program 'take off' tersebut belum/tidak akan terwujud pada akhir REPELITA V ini, apalagi dalam suasana krisis ekonomi dan dehumanisasi yang semakin terasa melanda negara dan bangsa Indonesia.

Suatu perubahan yang bersifat mendasar, biasanya memang membawa dampak sosial dan budaya baik berupa diskontinuitas, disorganisasi, maupun disintegrasi. Oleh karena fenomena ini merupakan dampak logis dari suatu perubahan, maka dampak negatif tersebut harus ditekan ke tingkat yang paling rendah, hingga tercapai pemecahan masalah yang bersifat menyeluruh. Guna kepentingan itu, perubahan yang dilancarkan dalam salah satu aspek sosio-kultural harus dibarengi dengan perubahan-perubahan pada berbagai aspek/unsur lainnya. Dengan demikian, semua unsur sosio-kultural dari suatu masyarakat/bangsa dapat saling menunjang membentuk bagian atau keseluruhan yang bersifat integral. Setelah hal tersebut berhasil, akhirnya kontinuitas, organisasi, dan integrasi akan terwujud kembali. Suasana seperti ini, tentu baru akan terbentuk setelah mayoritas anggota masyarakat/bangsa telah mengambil langkah-langkah

bangsa itu tidak mengakibatkan hilangnya identitasnya masing-masing.

kah penyesuaian-penyesuaian, baik di bidang sosial maupun kebudayaan.

Belajar dari pengalaman negara-negara maju; kiranya kita perlu menyadari bahwa pembangunan fisik, tidaklah dapat dijadikan sebagai ukuran kesuksesan, pembangunan dan modernisasi suatu bangsa. Selama masyarakat / bangsa tertentu hanya menjadikan pembangunan fisik-material sebagai patokan, dan mengabaikan pembangunan mental-spiritual, maka perubahan yang terjadi tidak akan membawa manfaat berarti bagi masyarakat tersebut. Sebab ketimpangan pembangunan material dan imaterial itu pada gilirannya akan mengancam hasil-hasil yang telah tercapai. Oleh karena itu, kedua faktor tersebut harus mendapat perhatian dan penanganan yang serius dan seimbang oleh segenap unsur masyarakat atau bangsa dalam proses pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, maka semua eksponen masyarakat harus bersikap dinamis dan realistis guna mewujudkan/membina penyesuaian-penyesuaian dalam berbagai segi kehidupan mereka. Usaha seperti itu merupakan suatu langkah penting dalam menunjang perubahan sosio-kultural yang mengacu ke arah kemajuan. Sebaliknya bila masyarakat gagal menempuh langkah-langkah tersebut, maka hampir dapat dipastikan bahwa perubahan yang akan terjadi adalah bersifat kemunduran. Dikatakan demikian, karena masyarakat tersebut akan tenggelam dalam konflik dan pertentangan, sehingga dapat menyuburkan anomie dan alienation di dalam kehidupan mereka.

III. K E S I M P U L A N

Perubahan sosio-kultural merupakan suatu keadaan, di mana terjadi perbedaan-perbedaan kondisi sosial dan kebudayaan dalam masyarakat tertentu dari satu periode ke periode lainnya. Di dalam masyarakat mana pun di dunia ini perubahan tersebut akan terus berlangsung, baik disadari atau tidak oleh masyarakat bersangkutan. Suatu perubahan sudah pasti akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat, baik yang bersifat positif dan atau negatif.

Dalam setiap tahap perubahan, anggota masyarakat selalu mengalami masa transisi. Pada era ini individu-individu dalam masyarakat cenderung bersikap ambivalen, terombang ambing di antara dua atau lebih nilai dan norma yang berbeda. Maksudnya anggota masyarakat dihadapkan pada pilihan yang rumit antara; baik dan buruk, integritas dan disintegritas, reformasi dan tradisi, kontinuitas dan diskontinuitas, serta integrasi dan disintegrasi. Menghadapi persoalan seperti ini, anggota masyarakat harus menetapkan pilihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat bersangkutan. Selama masyarakat belum dapat menetapkan pilihannya, maka perbenturan antara nilai-nilai dan norma-norma akan terus berlangsung. Dengan demikian kestabilan masyarakat akan tetap terganggu, dan masa transisi akan terus berlanjut.

Bila masyarakat menetapkan pilihannya pada suatu unsur baru, maka masyarakat tersebut harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Proses ini biasanya mempunyai dampak yang multikompleks, sebab hal itu juga membutuhkan perubahan-perubahan unsur-unsur sosio-kultural lainnya, sehingga masing-masing unsur dapat saling men-

pang perubahan yang sedang berlangsung. Proses semacam ini akan lebih mudah terwujud dalam masyarakat yang dinamis, sementara dalam masyarakat yang kurang dinamis dan tradisionalisme akan menemukan kesulitan dalam mencapai penyesuaian-penyesuaian itu.

Perubahan sosial dapat digolongkan kepada 2 (dua) tipe, yaitu progress dan regress. Progress merupakan perubahan yang bersifat kemajuan, sementara regress merupakan perubahan yang mencerminkan kemunduran. Tentu saja semua individu dalam masyarakat menginginkan perubahan dalam bentuk pertama, tidak ada yang mengharapkan perubahan yang bersifat kemunduran. Hanya saja dalam kasus-kasus tertentu, kemajuan yang diraih dalam salah satu unsur juga menuntut pengorbanan dari unsur lainnya.

Berdasarkan pertimbangan terakhir ini lah dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian. Proses ini merupakan hal yang sangat penting pada setiap perubahan sosio-kultural apa pun bentuk dan coraknya. Apabila penyesuaian-penyesuaian tersebut gagal diwujudkan, maka akan menyusul persoalan-persoalan lain yang lebih rumit dan sulit untuk dipecahkan. Bahkan diduga situasi itu pada gilirannya dapat membawa masyarakat bersangkutan kepada jurang kehancuran dan kemunduran.

Dalam proses pembangunan dan modernisasi dewasa ini, sudah saatnya kita untuk memperhatikan dan menangani secara serius dan sungguh-sungguh tentang pembinaan mentalitas dan semua aspek kebudayaan imaterial seluruh anggota masyarakat. Pembangunan di negara-negara maju (Barat) cukup banyak memberikan contoh, betapa parahnya dampak sosial yang mereka alami sekarang, karena mereka mengabaikan unsur-unsur kebudayaan imaterial/rohani. Dalam

menuju program take off sekarang ini, sebagian anggota masyarakat kita juga cenderung untuk mengukur kesuksesan pembangunan dari faktor-faktor fisik-material, serta mengabaikan faktor-faktor imaterial. Apabila fenomena ini tidak dapat ditanggulangi secara tepat dan cepat, maka proses sejarah yang dialami negara-negara Barat pada umumnya, juga akan dialami oleh bangsa Indonesia dalam bentuk dan wujud yang berbeda. Maksudnya, kemajuan yang dicapai justru akan membahayakan keutuhan dan kelangsungan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia, di mana anggota masyarakat merasa terasing atas kemajuan-kemajuan yang mereka raih.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka sudah waktunya sekarang untuk merealisasikan pembangunan 'manusia Indonesia seutuhnya.' Artinya pembangunan fisik-material harus dibarengi dengan pembinaan mentalitas bangsa, sehingga kedua faktor itu saling menunjang dalam membentuk masyarakat dan budaya Indonesia modern. Hanya melalui langkah tersebut lah, perubahan sosio-kultural itu akan membawa dampak positif bagi perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker SJ, J.W.M., Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Kanisius, 1984.
- Broom, et al., Sociology, New York: Harper & Row Publisher, Inc., 1981.
- Hanafi, Abdillah, Memasyarakatkan Ide-ide Baru, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Harton, Paul B., and Chester L. Hunt, Sociology, New York: Harper & Row Publisher, Inc., 1964.
- _____, Sociology, New York - San Francisco: Harper & Row Publisher Inc., 1976.
- Kartodirdjo, Sartono, Kebudayaan Pembangunan Dalam Perspektif Sejarah, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987.
- _____, "Masa Transisi Akan Berlangsung Lama," KOMPAS No. 239 Tahun Ke-24, 27 Pebruari 1989.
- Kleden, Ignas, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, Jakarta: Aksara Baru, 1980.
- _____, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta: Gramedia, 1984.
- _____, Pengantar Antropologi Sosial dan Budaya, Jakarta: Penerbit Karunika-Universitas Terbuka, 1986.
- Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat, Yogyakarta: Tria Wacana, 1987.
- Linton, Ralp, The Study of Man, terjemahan Firmansyah, Bandung: Jemmars, 1984.
- Ogburn, William F., and Meyer F. Ninkoff, A Hand Book of Sociology, London: Morgan Paul Limited, 1953.
- _____, Sociology, Boston - New York: Houghton Mifflin Company, 1964.
- Rais, M. Amien, Krisis Ilmu-ilmu Sosial Dalam Pembangunan Di Dunia Ketiga, Yogyakarta: PLP2M, 1984.

- Soemardjan, Selo dan Soelaiman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1964.
- Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Jakarta: Rajawali, 1982.
- Veeger, K.J., Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Weiner, Myron, ed., Modernisasi: Dinamika Pertumbuhan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1984.
- Wileden, Arthur F., Community Development, Totowa, N.J.: The Bedminster Press, 1970.